



# Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Studi Kasus pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng)

Luh Gede Kusuma Dewi\*, Luh Gede Jayanti Mekar Sari  
Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana 11, Singaraja, Bali, Indonesia  
\*(kusumadewi5758@gmail.com)

---

## ABSTRAK

UMKM merupakan salah satu pilar dalam kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, setiap UMKM diharapkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rangka membuat keputusan *financial* serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan kesiapan pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas berbasis SAK EMKM. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner ke 77 sampel yang didapat dari 189 populasi pelaku usaha menengah yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sudah hampir seluruh pelaku usaha menengah mengetahui tentang dasar akuntansi serta aturan mengenai SAK EMKM sehingga telah siap dan mampu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah agar memberikan sosialisasi secara berkesinambungan tentang SAK EMKM kepada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan; UMKM; Usaha Menengah; SAK EMKM

## ABSTRACT

*MSMEs are one of the pillars of the Indonesian economic growth. In running its business, each MSMEs is expected to prepare financial reports. This financial report is used to analyze financial performance to make decisions and hold management accountable for using business resources. This study aims to determine how the knowledge and readiness of medium-sized businesses in the Buleleng Regency in implementing and preparing quality financial reports based on Financial Accounting Standard for MSMEs. Data collection method by distributing questionnaires to 77 samples from 189 populations of medium-sized businesses that calculated using the Slovin formula. The research method used is a descriptive qualitative method. The analysis shows that almost all medium business knows about the underlying accounting and rules regarding SAK EMKM so that they are ready and able to prepare quality financial reports. This research is expected to be able to contribute to the government to provide ongoing socialization of SAK EMKM for MSMEs in the Buleleng Regency.*

**Keywords:** Financial Statements; MSMEs; Medium Enterprises; SAK EMKM

---

## PENDAHULUAN

Selama ini Indonesia terkenal sebagai negara yang konsumtif. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menargetkan Indonesia sebagai pangsa pasarnya. Sebut saja Apple, Samsung, Xiaomi perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi yang menysar Indonesia sebagai pangsa pasar mereka. Wardhani (2006) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia sebagai negara berkembang akan memasuki pasar bebas APEC bersama 21 negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia.

Meningkatkan komoditi Indonesia merupakan salah satu solusi dalam menghadapi pasar bebas yang ada di depan mata. Langkah awalnya adalah dengan membangkitkan perekonomian bangsa dari sektor yang paling dasar, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Afifah dan Setiawan (2012) menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang berskala kecil yang dapat dikelola oleh sekumpulan orang maupun kelompok yang bertujuan memperoleh keuntungan. Kabupaten Buleleng merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian utara pulau Bali, merupakan

sebuah wilayah dekat pesisir yang pada zaman dahulu terkenal dengan kegiatan perdagangannya. Hingga saat ini pergerakan ekonomi kota kecil ini masih aktif walau perkembangannya tidak dapat disamakan dengan Kota Denpasar. Data dari Diskop UMKM Kabupaten Buleleng (diakses 11 September 2019) mencatat jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tahun 2017, berdasarkan klasifikasi usahanya, sebagai berikut: Usaha Mikro tercatat 1.871 unit usaha formal, dan 22.679 unit usaha non formal. Usaha Kecil tercatat 468 unit usaha formal, dan 7.679 unit usaha non formal. Usaha Menengah tercatat 189 unit usaha formal, dan 4 unit usaha non formal. Usaha Besar tercatat 17 unit usaha formal. Jumlah total UMKM di Kabupaten Buleleng tahun 2017 sebanyak 32.907 UMKM.

Membahas mengenai unit usaha, tidak terlepas dengan catatan akhir kegiatan operasionalnya, yaitu laporan keuangan. Setiap UMKM diharapkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rangka membuat keputusan *financial* serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut. Menurut PP No. 17 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menetapkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48, pemegang Izin Usaha wajib menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan kegiatan usaha dan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan. Pembukuan kegiatan usaha yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan yang dipisahkan antara harta usaha dan bukan usaha. Namun, kenyataannya secara umum di Indonesia masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut DSAK IAI telah mengesahkan SAK EMKM dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi pelaku UMKM sehingga dapat memperoleh akses pendanaan melalui perbankan, ataupun dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Namun dalam praktiknya, belum semua

UMKM di Indonesia sadar dan mau menerapkan SAK EMKM ini dalam laporan keuangannya. Berbagai kendala dapat diungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan SAK EMKM bagi UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Amani (2018) menunjukkan bahwa UMKM UD Dua Putri Solehah yang berlokasi di Probolinggo belum menyusun laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM yang telah ditetapkan mulai 1 Januari 2018. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Putra (2018) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa 80,4% mayoritas UMKM di Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya yang dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi pengelola UMKM dalam pencatatan laporan keuangan.

Sholikin and Setiawan (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kendala kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM adalah kesadaran akan pentingnya laporan keuangan belum dimiliki oleh pelaku UMKM, tidak adanya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM serta pengetahuan tentang SAK EMKM yang dimiliki masih minim. Sedangkan Salmiah et al.

(2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM setelah dilakukan survey pada pelaku UMKM di Kota Pekanbaru masih pada tingkat cukup.

Diskop UMKM Kabupaten Buleleng (diakses 11 September 2019) mencatat terdapat 189 unit usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan peluang bagi 189 usaha menengah tersebut untuk mendapatkan pemodal dari perbankan, serta berkontribusi terhadap pajak daerah oleh karena itu seharusnya pelaku usaha menengah melakukan pencatatan yang baik sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. Untuk memaksimalkan implementasi SAK EMKM ini maka perlu adanya pengetahuan dan kesiapan para pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng, merujuk dari faktor-faktor pengimplementasian SAK EMKM, sesuai hasil penelitian dari Sholikin and Setiawan (2018).

Pengetahuan pelaku usaha menengah tentang SAK EMKM dilihat dari kemampuan pelaku tersebut untuk memberikan informasi mengenai unsur-unsur dan struktur laporan keuangan yang berlaku sesuai SAK EMKM. Sedangkan

kesiapan pelaku usaha menengah merupakan keadaan dimana pelaku usaha telah mampu mengimplementasikan sebuah standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian untuk menganalisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Studi Kasus pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng). Penelitian mengenai standar akuntansi keuangan EMKM terkait pelaku usaha menengah yang berfokus pada Kabupaten Buleleng masih jarang ditemukan. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat tema ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a) Bagaimana pengetahuan pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
- b) Bagaimana kesiapan pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM?

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengetahuan para pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM serta untuk mengetahui kesiapan pelaku usaha menengah tersebut dalam mengimplementasikan SAK EMKM ke dalam laporan keuangan usahanya.

Alasan memilih jenis usaha menengah untuk dijadikan objek penelitian ini adalah usaha menengah sudah diharuskan dan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan harus sesuai dengan SAK EMKM, sedangkan jenis usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan, namun jika sanggup bisa untuk dilaksanakan.

Diharapkan kedepannya penelitian ini mampu memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi para peneliti, mahasiswa atau pihak-pihak lain yang memerlukan referensi dalam menilai tingkat pengetahuan dan kesiapan pelaku usaha menengah dalam menyusun SAK EMKM.

## **TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah Pasal 1 tentang UMKM disebutkan sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang dan/atau badan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penghasilan usaha yang tidak lebih dari Rp. 30.000.000 dalam setahun.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penghasilan usaha yang tidak lebih dari Rp. 30.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000 dalam setahun.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha

besar sesuai kriteria usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdiri, dan berpenghasilan Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000 tiap tahunnya.

### **Definisi Pengetahuan**

Menurut Kamus Webster, Pengetahuan merupakan informasi yang ditemui dan diperoleh oleh manusia melalui pengamatan akal untuk mengenali suatu benda atau kejadian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seringkali pengetahuan dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat kecerdasan seseorang. Dalam KBBI dijelaskan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang berkenaan dengan mata pelajaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan makna dari sesuatu yang didapatkan atau yang sedang menjadi pembahasan diskusi.

SAK EMKM adalah suatu standar akuntansi yang digunakan bagi entitas mikro, kecil dan menengah yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi

pengguna eksternal. Maka dalam penelitian ini, pengetahuan SAK EMKM merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM.

### **Definisi Kesiapan**

Kesuksesan penerapan teknologi baru di dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh faktor kesiapan *brainware* atau penggunanya, Sheu dan Kim dalam Qadrya (2017) baik secara lingkup internal maupun eksternal. Kesiapan (*readiness*) menurut Business Dictionary diartikan sebagai pernyataan siap dari seseorang, sistem atau organisasi untuk memenuhi dan melaksanakan sebuah kegiatan yang terencana. Kesiapan ini berdasarkan pada ketelitian perencanaan, kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan dari sistem. Menurut Mulyasa dalam Sholikin dan Setiawan (2018), kesiapan juga berarti suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi.

Dalam hal ini berarti kesiapan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Kondisi yang dimiliki

seseorang sangat berpengaruh terhadap adanya kesiapan dan respon yang akan diberikan oleh seseorang tersebut. Menurut Slameto dalam Trisomantagani et al. (2018) menyatakan:

“Kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon”.

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan atas suatu situasi yang sedang terjadi. Kesiapan dalam penelitian ini adalah keadaan seseorang yang membuatnya siap untuk mengimplementasikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Tingkat kesiapan dalam penelitian ini akan dinilai dari persepsi dan faktor pendukung mengenai SAK EMKM. Persepsi mengenai SAK EMKM yang dimaksud yaitu persepsi tentang pentingnya Standar Akuntansi, pencatatan transaksi, menyimpan bukti transaksi, kontrol terhadap jalannya usaha, pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, membutuhkan seseorang yang ahli dalam akuntansi, serta

akan melakukan pencatatan berdasarkan SAK EMKM.

### **Tingkatan kesiapan**

Menurut Madanmohan Rao dalam Oktavianti (2015), terdapat lima tingkatan kesiapan diri. Yaitu *not ready, preliminary, ready, receptive, dan optimal*”. Level kesiapan pengelola usaha menengah dalam mengimplementasikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) *Not Ready*, dengan karakteristik belum adanya pemahaman mengenai laporan keuangan berbasis SAK EMKM, belum adanya pemahaman mengenai visi misi dari SAK EMKM. Dalam penelitian ini contohnya, pengelola usaha menengah belum menyadari pentingnya suatu standar akuntansi seperti SAK EMKM.
- b) *Preliminary*, dengan karakteristik sudah mengenal pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM, proses dalam organisasi sudah menggambarkan kegiatan akuntansi berbasis SAK EMKM, dan sudah terdapat individu yang menggalakkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Contohnya dalam penelitian ini yaitu pengelola usaha menengah

sudah mencatat setiap transaksi yang terjadi pada usaha tersebut, menyimpan setiap bukti transaksi, melakukan pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi.

- c) *Ready*, dengan karakteristik individu dalam organisasi sudah mempraktikkan aktivitas yang efektif untuk mendukung laporan keuangan berbasis SAK EMKM, kegiatan akuntansi termasuk membuat laporan keuangan berbasis SAK EMKM sudah dilaksanakan setiap waktu di setiap kegiatan pekerjaan, serta sudah ada sistem dokumentasi. Contohnya dalam penelitian ini yaitu semua transaksi yang terjadi dalam usaha menengah telah didukung dengan sistem komputer, telah menggunakan *software* akuntansi dan sistem informasi akuntansi.
- d) *Receptive*, dengan karakteristik laporan keuangan berbasis SAK EMKM sudah berjalan efektif dan efisien. Contohnya dalam penelitian ini yaitu sudah adanya seseorang yang ahli dalam akuntansi untuk membantu dalam membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

- e) *Optimal*, organisasi telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SAK EMKM. Contohnya dalam penelitian ini yaitu pengelola usaha menengah telah mengikuti standar akuntansi terkhusus SAK EMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi.

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. SAK EMKM berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2018. Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) maka standar ini dimaksud untuk:

- a) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.
- b) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan

Menengah (SAK EMKM) digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Tujuan laporan keuangan secara umum menurut Irham (2012) diantaranya untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang profesional, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual yaitu aset, hutang, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui atau dicatat pada waktu terjadinya atau pada tanggal perolehan dan kelangsungan usaha merupakan kemampuan melanjutkan usaha di masa depan, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis adalah entitas bisnis harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas lainnya. Laporan keuangan entitas terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika UMKM dalam mencatat laporan keuangan menggunakan dasar akrual maka

UMKM tersebut relatif siap dalam rangka implementasi SAK EMKM. Sebaliknya, jika UMKM belum mencatat sama sekali laporan keuangan atau sudah mencatat laporan keuangan menggunakan basis kas maka UMKM tersebut relatif belum siap dalam implementasi SAK EMKM, karena SAK EMKM menggunakan asumsi dasar akrual yang membuat UMKM perlu menyesuaikan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini, metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh kemudian dikaji kembali dengan menjelaskan seberapa tahu dan siapkah pelaku usaha menengah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas (sesuai SAK EMKM). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner yang akan disebar ke responden. Skala yang digunakan dalam

penyusunan kuesioner adalah skala *likert*. Tempat penelitian ini adalah usaha menengah di Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari jawaban kuesioner responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Menengah yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 yaitu sebanyak 189 Usaha Menengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu *random sampling*, dengan hasil perhitungan rumus slovin sejumlah 77 Usaha Menengah, yang dikategorikan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Kuesioner ini disebar secara acak ke Usaha Menengah yang ada di Kabupaten Buleleng, hal ini dilakukan tanpa memilah apakah penyusun laporan keuangan harus memiliki pendidikan terakhir tertentu, ataupun pengalaman kerja tertentu. Setelah data terkumpul maka dilakukan tabulasi dan analisis deskriptif data dengan bantuan SPSS, lalu dikaji kembali dengan melihat persentase kesiapan dan pengetahuan pelaku usaha menengah mengenai SAK EMKM ini dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Definisi Operasional Variabel**

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu Pengetahuan Pelaku UMKM dan Kesiapan Pelaku UMKM.

Variabel Pengetahuan pengelola Usaha Menengah terdiri dari indikator dasar akuntansi dan SAK EMKM. Pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan pelaku usaha tentang dasar-dasar akuntansi dimulai dari item pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, pengertian aktiva, pasiva dan ekuitas serta proses akhir dari akuntansi dan manfaat laporan keuangan. Lalu item pada indikator SAK EMKM dimulai dari pengetahuan penerbitan SAK EMKM, aturann, pengakuan dan komponen laporan keuangan.

Variabel Kesiapan pengelola Usaha Menengah terdiri dari indikator persepsi dan fasilitas pendukung dengan item pentingnya SAK EMKM, pencatatan akuntansi, penyimpanan bukti transaksi, monitoring, peranan ahli akuntansi serta pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sumber Narsa Widodo dan Kurnianto (2012), Cahyati dan Setyawasih (2011) dalam Falah Rafiq (2018).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini, yang

pertama adalah mengenai pengetahuan pelaku Usaha Menengah dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama harus diketahui dahulu bagaimana pengetahuan dasar akuntansi dari pihak pelaku usaha menengah. Kemudian dilakukan analisis terhadap pengetahuan pelaku usaha menengah terhadap SAK EMKM.

Permasalahan kedua yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan pelaku Usaha Menengah di kabupaten Buleleng dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Maka berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing permasalahan tersebut.

### **Variabel Pengetahuan mengenai Dasar Akuntansi**

Dalam penelitian ini, pengetahuan mengenai dasar akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan. Terdapat 12 pertanyaan menyangkut pengetahuan dasar akuntansi yang harus dijawab oleh responden. Berikut adalah analisis SPSS dari jawaban kuisisioner yang menunjukkan tentang

pengetahuan dasar akuntansi dari 77 orang responden.

Tabel 1 Data Deskriptif Pengetahuan Dasar Akuntansi

		<i>Frequency</i>	<i>Percentage</i>	<i>Valid Percentage</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Tahu	5	6.5	6.5	6.5
	Netral	4	5.2	5.2	11.7
	Tahu	37	48.1	48.1	59.7
	Sangat Tahu	31	40.3	40.3	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 1 di atas dapat dinyatakan bahwa pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya mengetahui tentang dasar-dasar akuntansi. Karena dapat dilihat bahwa dari 77 sampel, sebanyak 37 pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng menyatakan dirinya ‘mengetahui’ tentang dasar-dasar akuntansi. Dan 31 pelaku usaha menengah menyatakan ‘sangat mengetahui’ dasar-dasar akuntansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rafiqa (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM di Kota Padang, terhadap dasar-dasar akuntansi adalah ‘paham’. Pada penelitian ini, hal ini terjadi karena sebagian besar responden merupakan berpendidikan SMK jurusan akuntansi dan S1 akuntansi. Pendidikan yang linier dianggap berperan penting dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas di dunia kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Lohanda dan

Mustikawati (2018) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP.

#### **Variabel Pengetahuan mengenai SAK EMKM**

Dalam penelitian ini, pengetahuan terhadap SAK EMKM yang dimaksud adalah merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM. Kuisisioner yang mengukur tingkat pengetahuan responden terhadap SAK EMKM terdiri dari 8 pernyataan yang harus dijawab dengan pilihan ‘Tidak Tahu’, ‘Netral’, ‘Tahu’, ‘Sangat Tahu’. Dengan skala 1-5. Hal ini merupakan rentang tingkatan pengetahuan yang dirasakan oleh responden penelitian

usaha menengah mengenai SAK EMKM ini.

Berikut adalah analisis SPSS dari jawaban kuisisioner yang

menunjukkan tentang pengetahuan dasar akuntansi 77 orang responden.

Tabel 2 Data Deskriptif Pengetahuan SAK EMKM

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Tahu	6	7.8	7.8	7.8
	Netral	4	5.2	5.2	13.0
	Tahu	41	53.2	53.2	66.2
	Sangat Tahu	26	33.8	33.8	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, dapat dinyatakan bahwa pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya mengetahui tentang Standar Akuntansi Keuangan EMKM yang diterbitkan pada 1 Januari 2018 lalu. Karena dapat dilihat bahwa dari 77 sampel, sebanyak 41 pelaku Usaha Menengah menyatakan dirinya ‘mengetahui’ tentang Standar Akuntansi Keuangan EMKM, dan 26 orang menyatakan ‘sangat tahu’ tentang Standar Akuntansi Keuangan EMKM.

Sehingga dari kedua analisis diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng telah memiliki pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan.

### **Variabel Kesiapan dengan indikator persepsi dan fasilitas pendukung**

Variabel kesiapan pelaku Usaha Menengah diteliti dengan 10 pernyataan yang menunjukkan indikator persepsi dan fasilitas pendukung. Setiap pernyataan harus diberi nilai dengan rentang nilai 1-5, atau dengan skala 'Sangat Tidak Siap', 'Tidak Siap', 'Netral', 'Siap', dan 'Sangat Siap'. Skala ini menunjukkan persepsi masing-masing reponden terhadap kesiapannya menerapkan SAK EMKM didalam penyusunan laporan keuangan Usaha Menengah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif masing-masing indikator yang digunakan pada penelitian ini diperoleh hasil seperti yang terjabarkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Data Deskriptif Variabel Kesiapan

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1.1	77	2	3	5	324	4.21	0.800	0.640
X1.2	77	3	2	5	308	4.00	0.778	0.605
X1.3	77	3	2	5	308	4.00	0.889	0.789
X1.4	77	2	3	5	321	4.17	0.470	0.221
X1.5	77	3	2	5	321	4.17	0.965	0.932
X1.6	77	4	1	5	273	3.55	1.142	1.304
X1.7	77	4	1	5	258	3.35	1.156	1.336
X1.8	77	4	1	5	259	3.36	1.256	1.577
X1.9	77	3	2	5	292	3.79	0.864	0.746
X1.10	77	4	1	5	303	3.94	0.833	0.693
Valid N					77			

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan Tabel 3 diatas, pernyataan pertama (X1.1) adalah mengenai pentingnya SAK dan kesiapan pelaku Usaha Menengah dalam menerapkan SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,21 kali dengan klasifikasi cukup siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti ‘sangat siap’ dan terendah 3 yang berarti ‘netral’. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menengah memiliki tingkat kesiapan yang cukup tinggi dalam menyusun laporan keuangan atas usaha yang dijalankannya sesuai dengan SAK EMKM yang telah ditetapkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rafiq (2018) yang menyatakan bahwa usaha menengah cukup siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan usaha.

Pernyataan kedua (X1.2) adalah mengenai kesiapan pencatatan setiap

transaksi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,00 kali dengan klasifikasi cukup siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti ‘sangat siap’ dan terendah 2 yang berarti ‘tidak siap’. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menengah tersebut telah cukup siap dalam melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di dalam usahanya. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Rahmawati dan Puspasari (2016) yang menyatakan bahwa pengusaha UMKM menganggap bahwa pembukuan transaksi penting untuk perkembangan usaha mereka dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kegiatan UMKM.

Pernyataan ketiga (X1.3) adalah mengenai kesiapan dan pelaksanaan penyimpanan bukti transaksi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,00 kali dengan klasifikasi

cukup siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 2 yang berarti 'tidak siap'. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam usahanya, pelaku usaha telah menyimpan bukti transaksi tersebut untuk dilakukan pencatatan pada jurnal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Narsa et al. (2012) yang menyatakan bahwa beberapa pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi bahkan bukti transaksi akan dibuang manakala proses transaksi dirasa telah selesai.

Pernyataan keempat (X1.4) adalah mengenai kesiapan dari adanya pelaksanaan monitor perkembangan usaha. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,17 kali dengan klasifikasi cukup siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 3 yang berarti 'netral'. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan adanya monitoring pada perkembangan usaha telah terjadi peningkatan sehingga pelaku usaha telah mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Pernyataan kelima (X1.5) adalah mengenai pemisahan modal. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,17 kali dengan klasifikasi

cukup siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 2 yang berarti 'tidak siap'. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mampu memisahkan pencatatan modal usaha dengan modal pribadinya agar mudah dalam penyusunan laporan perubahan modal usaha tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salmiah et al. (2015) yang menyatakan bahwa UMKM di Kota Pekanbaru telah secara lengkap melakukan proses akuntansi sesuai dengan aturan dan tahapan dalam siklus akuntansi sesuai SAK.

Pernyataan keenam (X1.6) adalah mengenai kesiapan pencatatan dengan sistem. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,55 kali dengan klasifikasi tidak siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 1 yang berarti 'sangat tidak siap'. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menengah belum seluruhnya siap untuk menggunakan sistem dalam proses pencatatan akuntansi dan masih banyak yang melakukan pencatatan secara manual atau sederhana. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Siyami (2014) yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo tidak menggunakan sistem

informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya.

Pernyataan ketujuh (X1.7) adalah mengenai kesiapan penggunaan *software*. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,35 kali dengan klasifikasi tidak siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 1 yang berarti 'sangat tidak siap'. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pelaku usaha menengah dalam penggunaan *software* akuntansi dalam proses pencatatan akuntansi masih rendah yang diakibatkan dari sulitnya penggunaan aplikasi dan kendalanya waktu dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan *software* dalam proses pencatatan akuntansi memberikan dampak positif dan tidak membuang waktu yang banyak dalam menggunakan aplikasi atau *software* akuntansi.

Pernyataan kedelapan (X1.8) adalah mengenai kesiapan penggunaan SIA. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,36 kali dengan klasifikasi tidak siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 1 yang berarti 'sangat tidak siap'. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dalam pemakaian atau penerapan SIA pada usaha menengah masih terlihat cukup rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Siyami (2014) yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo tidak menggunakan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya.

Pernyataan kesembilan (X1.9) adalah mengenai kesiapan dan perlunya ahli dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,79 kali dengan klasifikasi cukup perlu dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 2 yang berarti 'tidak siap'. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang memerlukan ahli akuntansi untuk melakukan proses akuntansi dalam mengelola keuangan usahanya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Faturokhman et al. (2015) yang menyatakan bahwa kurangnya keterampilan dalam akuntansi, sehingga diperlukan tenaga ahli dalam melakukan proses akuntansi.

Pernyataan terakhir (X1.10) adalah mengenai kesiapan pencatatan dan pelaporan berbasis SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah

sebesar 3,94 kali dengan klasifikasi hampir cukup siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti 'sangat siap' dan terendah 1 yang berarti 'sangat tidak siap'. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menengah hampir seluruhnya sudah mencatat dan melaporkan keadaan usahanya terutama dibidang keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang telah ditetapkan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Salmiah et al. (2015) yang menyatakan bahwa UMKM di Kota Pekanbaru telah secara lengkap melakukan proses akuntansi sesuai dengan aturan dan tahapan dalam siklus akuntansi sesuai SAK EMKM.

Maka berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku Usaha Menengah yang terdapat di Kabupaten Buleleng rata-rata sudah siap dalam mengimplementasikan dan menyusun laporan keuangan usahanya berbasis SAK EMKM. Hal ini ditemukan pula pada penelitian Fatimah (2017) yang mana menunjukkan bahwa tiga dari lima usaha kecil yang menjadi sampel di Kabupaten Purworejo belum siap dalam menerapkan SAK EMKM. Dua usaha kecil lainnya siap untuk menerapkan SAK EMKM dalam usahanya. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa temuan, tentang laporan keuangan serta pengetahuan

tentang SAK EMKM. Namun dalam penggunaan sistem informasi akuntansi dan *software* akuntansi digital bisa dikatakan masih belum siap.

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya telah memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan EMKM.

Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng telah siap mengimplementasikan standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan usahanya. Dengan melakukan proses akuntansi secara sistematis maka laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat memberikan informasi yang tepat bagi pengambilan keputusan para penggunanya. Walaupun demikian, diharapkan adanya sosialisasi mengenai SAK EMKM secara berkesinambungan demi meningkatkan dan menjaga kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

Walaupun hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang baik, tidak menutup saran untuk pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng. Diharapkan para pelaku usaha menengah mulai mencoba menggunakan akuntansi digital berbasis SAK EMKM untuk membantu pencatatan keuangannya. Hal ini terkait pernyataan keenam (X1.6) terkait penggunaan sistem dalam pencatatan transaksi akuntansi masih rendah, pernyataan ketujuh (X1.7) mengenai penggunaan software dalam penyusunan laporan keuangan juga masih rendah. Penggunaan teknologi digital dalam membantu penyusunan laporan dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini pun masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus kepada usaha menengah saja. Diharapkan untuk kedepannya penelitian ini bisa dikembangkan lagi dengan memperluas cakupannya populasinya. Sehingga populasi yang diambil adalah usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan konsep dari SAK EMKM. Hal lain yang dapat dikembangkan dalam penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM di kota-kota kecil lainnya. Terkait penggunaan aplikasi digital akuntansi yang telah sesuai SAK EMKM juga merupakan topik yang

menarik untuk dikembangkan. Besar harapan peneliti kedepannya keterbatasan pada penelitian ini mampu dilengkapi oleh penelitian-penelitian lainnya.

## REFERENSI

- Afifah, R. Z., & Setiawan, A. H. (2012). Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM Di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 1–15.
- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12–30.
- Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary. (n.d.).
- Dinas, S. (2019). Statistik Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng.
- Fatimah, A. N. (2017). *Analisis Kesiapan Lima Usaha Kecil dalam Implementasi SAK EMKM di Kabupaten Purworejo*.
- Faturokhman, A., Puspasari, N., Pinasti, M., & Sri Rejeki, K. (2015). *University's One Stop Accounting Service untuk UKM: Solusi Mengatasi Keengganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*.
- IAI. (n.d.). Standar Akuntansi Keuangan EMKM.
- Irham, F. (2012). *Analisis Laporan*

- Keuangan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- KBBI Daring Kemdikbud. (n.d.).
- Lestari, K. P., Herawati, N. N. T., & Atmadja, A. T. (2018). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penggunaan Aplikasi Lamikro di Kecamatan Buleleng Tahun 2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).  
<https://doi.org/10.23887/JIMAT.V9I1.20493>
- Lohanda, D., & Mustikawati, R. I. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(5).
- Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. (2012). Mengungkap Kesiapan dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 22(3).
- Oktavianti, E. (2015). Tingkat Kesiapan Implementasi Knowledge Management Pada Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 6(1), 69–84.
- Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com. (n.d.).
- PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah [JDIH BPK RI]. (n.d.).
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita*, 11(2), 201–217.
- Qadrya, H. A. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Single Sign-On di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rafiqah, F. (2018). *Analisis Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK EMKM dalam Pelaporan Keuangan di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Rahmawati, T., & Puspasari, O. R. (2016). Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Kuningan. *SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 532–539.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru). *Akuntansi Dewantara*, 1(2).
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2018). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194–214.
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM di Kabupaten Blora). *Journal of Islamic Financial an Accounting*, 1(2), 35–50.
- Siyami, N. (2014). *Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah di Purworejo*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Trisomantagani, I. K. A., Yasa, I. N. P., & Yuniarta, G. A. (2018). PERSEPSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KESIAPAN DALAM MENERAPKAN SAK EMKM. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V8I2.14607>

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [JDIH BPK RI]. (n.d.).

Wardhani, B. (2006). APEC 2020 Bagi Indonesia: Mitra atau Pemangsa. *Jurnal Ilmu Internasional*, 19(4), 49–58.